

BAB III

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DALAM MENSTABILKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK PADA TAHUN 2013

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi merupakan dinas yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal perindustrian perdagangan dan koperasi. Salah satu bagian yang menjadi urusan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga dapat menjamin setiap masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 67 Tahun 2008 Disperindagkop merupakan unsur pelaksana dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi.

Dengan demikian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi bertugas dalam melakukan kebijakan dan program dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi. Pada tahun 2013 sendiri terdapat berbagai isu yang merupakan permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mencapai target. Mulai dari target untuk melakukan swasembada pangan, kestabilan harga pokok yang terus mengalami fluktuasi karena munculnya berbagai permasalahan seperti kenaikan harga BBM, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar yang mempengaruhi harga barang impor serta kenaikan tarif dasar listrik hingga permasalahan lainnya.

Diantara barang – barang yang mengalami kenaikan harga, harga barang kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan barang

kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Jika barang lain bisa diganti atau bahkan tidak perlu dibeli jika mengalami kenaikan harga, maka hal yang berbeda untuk barang kebutuhan pokok. Meskipun harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan tetapi masyarakat akan tetap membelinya. Hal ini dikarenakan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi masyarakat dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya. sehingga tidak heran jika harga kebutuhan pokok mulai melonjak masyarakat melakukan berbagai protest. Melihat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat biasanya melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi konsumsi. Adapun kebutuhan pokok yang harus dipenuhi masyarakat seperti beras, minyak, gula, kedelai, gas LPG, sayur – sayuran garam beryodium dll. Setelah melakukan pencarian data penelitian, peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dapat dilihat dari beberapa program atau kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang berkaitan dengan kestabilan harga kebutuhan pokok yaitu mulai dari Operasi Pasar, sosialisasi dan pembinaan dibidang perdagangan, Pemantauan distribusi barang dan jasa, Pengadaan barang kabutuhan pokok dan Pengelolaan Gudang dengan sistem resi gudang.

- Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan kestabilan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai instansi yang berwenang dan berkewajiban dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian Perdagangan

dan Koperasi terus berusaha melakukan realisasi program kerja yang berkaitan dengan kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Berikut dapat dilihat program kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok. Dalam Penelitian ini, Peran pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar
- b. Sosialisasi dan pembinaan di bidang perdagangan
- c. Pemantauan distribusi barang dan jasa
- d. Pengadaan barang kebutuhan pokok
- e. Pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang

A. Realisasi Program Terkait Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok

1. Operasi Pasar

Dalam mencapai target kestabilan harga kebutuhan pokok, pihak pemerintah Kabupaten Bantul Khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memiliki beberapa program kerja terkait dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok pada tahun 2011 – 2015. Pada tahun

Tabel 3.1

Program Kerja Disperindagkop Terkait Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok

Permasalahan	Solusi	Program	Realisasi
Kelangkaan	a. Pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Masyarakat) b. Pengadaan operasi pasar murah komoditas tertentu dengan harga terjangkau	a. Bekerjasama dengan kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat b. Mengadakan operasi pasar murah atau operasi pasar khusus	a. Bekerja sama dengan kabupaten Kulonprogo dan sleman dalam memenuhi stok kebutuhan seperti sayuran dan buah b. Pengadaan operasi pasar khusus beras di beberapa pasar tradisional
Tidak meratanya jumlah stok barang kebutuhan pokok	a. Pemantauan distribusi barang dan jasa ke beberapa pasar tradisional	a. Melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di beberapa pasar secara rutin	a. Pemantauan distribusi barang dan jasa di beberapa pasar tradisional terbesar di Bantul seperti Pasar Niten, Pasar Bantul, Pundong, Imogiri dan Pasar Piyungan
Terjadinya permainan dari para pedagang dan spekulen dengan menimbun barang dan menaikkan harga barang menjelang kebijakan pemerintah	b. Memberikan sosialisai dan pembinaan kepada para pedagang	a. Mengadakan sosialisasi dan sosialisasi kepada para pedagang	a. Mengundang para pedagang untuk diberikan sosialisasi dan pembinaan di kantor Disperindagkop Bantul
Penjualan pangan dengan harga murah oleh para petani ketika panen	a. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para petani	a. Mengadakan gudang penyimpanan dengan sistem resi gudang sebagai tempat penyimpanan hasil panen	a. Pengadaan sitem resi gudang di Pasar Niten b. Sosialisasi sistem resi gudang di SRG Niten

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi akan mengadakan berbagai program dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melihat dari beberapa masalah yang difokuskan yang menjadi penyebab terjadinya lonjakan harga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan rencana kegiatan atau program secara fokus pada beberapa permasalahan.

Mulai dari permasalahan kelangkaan yaitu dimana jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Kelangkaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang. Kelangkaan sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama kurangnya stok barang di daerah karena produksi daerah akan komoditas tertentu terbatas. Hal ini biasanya terkait dengan kemampuan pertanian maupun perkebunan dalam menghasilkan beberapa komoditas pangan seperti beras, kedelai, jagung, sayuran, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya. Kedua yaitu karena adanya permainan dari para pedagang dimana biasanya ketika ada kebijakan nasional yang berhubungan dengan harga barang seperti kenaikan harga BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan menjelang bulan Ramadhan, para pedagang biasanya melakukan berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan. Mulai dari penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan komoditas pangan di pasaran sehingga terjadinya kenaikan harga. Selain itu biasanya pedagang juga melakukan kecurangan dengan merekayasa timbangan yang menjadi ukuran dalam kemasan barang seperti timbangan dalam penjualan beras, gula, minyak goreng sehingga merugikan konsumen.

Melihat permasalahan kelangkaan ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan beberapa langkah seperti pengadaan barang dan jasa dan operasi pasar. Pengadaan barang dan jasa disini yaitu dimana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan pengadaan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian dilapangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul melakukan pengadaan barang kebutuhan pokok dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul dalam pengadaan barang kebutuhan pokok yaitu untuk komoditas sayuran dan buah-buahan.

Tabel 3.2

**Realisasi Program Kegiatan Disperindagkop Terkait Kestabilan Harga
Kebutuhan Pokok**

No	Program	Tujuan	Sasaran
1	Operasi Pasar	Menyediakan komoditas dengan harga terjangkau	Para pedagang dan konsumen (masyarakat)
2	Pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau harga kebutuhan pokok di pasaran 2. Memantau distribusi barang dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang di pasar tradisional 2. Para pedagang perantara (distributor)
3.	Sosialisasi dan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan program dan kebijakan baru pemerintah 2. Membina para petani dalam mengelola hasil panen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pedagang pasar tradisional 2. Para petani
4.	Gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penyimpanan hasil panen para petani 2. Menstabilkan penyediaan kebutuhan pokok pangan (beras, kedelai dan jagung) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para petani di Kabupaten Bantul
5	Pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi stok kebutuhan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pedagang

Sumber : Rencana Kerja Disperindagkop Kab Bantul 2011-2015

Operasi pasar atau yang biasa dikenal dengan operasi pasar murah merupakan kegiatan penjualan barang atau komoditas tertentu dengan harga yang terjangkau.

Operasi pasar merupakan aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan

pokok masyarakat kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi (pergub

No 43 Tahun 2011) Jadi operasi pasar merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang telah mendapat subsidi dari pemerintah agar barang yang dijual memiliki harga lebih rendah dari harga biasanya di pasaran.

Operasi pasar biasanya merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat serta memberikan kemudahan bagi golongan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Karena ketika harga kebutuhan pokok melonjak yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Untuk menjamin mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok, pemerintah memberikan kemudahan akses dengan dilaksanakannya operasi pasar.

Operasi pasar atau operasi pasar murah dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama dengan mengumpulkan para pedagang kebutuhan pokok yang kemudian para pedagang tersebut mendaftarkan diri untuk mengikuti operasi pasar murah. Setelah mendaftarkan diri para barang yang dijual pedagang tersebut mendapatkan subsidi agar dijual dengan lebih murah kepada masyarakat. Subsidi biasanya ditentukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan bergantung pada jumlah kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga. Operasi pasar seperti ini biasanya dilakukan di pasar tradisional yang telah ditentukan. Yang menjadi permasalahan dengan operasi pasar seperti ini adalah biasanya para pedagang lain banyak yang ikut membeli di pasar murah hingga akhirnya dijual kembali. Para pedagang nakal ini biasanya membeli dalam jumlah yang cukup banyak sehingga

mendapatkan masyarakat atau konsumen merasa kecewa karena kebiasaan stok di operasi

Kedua operasi pasar dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang membeli kebutuhan pokok kepada para pedagang dengan jumlah tertentu yang kemudian dijual langsung kepada para pembeli atau masyarakat. Biasanya pemerintah bekerjasama dengan beberapa Koperasi Unit Desa atau Kepala Desa untuk mengadakan operasi pasar murah agar mudah dijangkau masyarakat. Operasi pasar murah seperti ini biasanya diadakan karena terjadinya lonjakan harga akibat kelangkaan jumlah stok barang di pasaran.

Operasi pasar kebutuhan pokok dibagi menjadi dua yaitu:

a. Operasi pasar murah

Merupakan operasi pasar murah yang menyediakan beberapa macam komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir. Operasi pasar seperti ini biasanya memberikn kemudahan bagi konsumen terutama masyarakat golongan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Operasi pasar murah seperti ini biasanya menyediakan paket bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau.

b. Operasi pasar khusus

Operasi pasar khusus merupakan operasi pasar yang hanya menyediakan satu jenis komoditas yang mengalami kelangkaan atau lonjakan harga. Operasi pasar khusus di Indonesia biasanya digelar ketika komoditas tertentu mengalami kelangkaan atau lonjakan harga karena naiknya harga di level global atau internasional. Misalnya operasi khusus

kedelai yang hanya menyediakan kedelai karena naiknya harga kedelai. Operasi khusus beras karena naiknya harga beras. Jadi operasi pasar khusus lebih fokus kepada satu komoditas yang mengalami lonjakan harga.

Selain untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok operasi pasar murah bertujuan untuk :

1. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok
2. Menambah jumlah stok barang di pasaran
3. Mencegah terjadinya kelangkaan barang

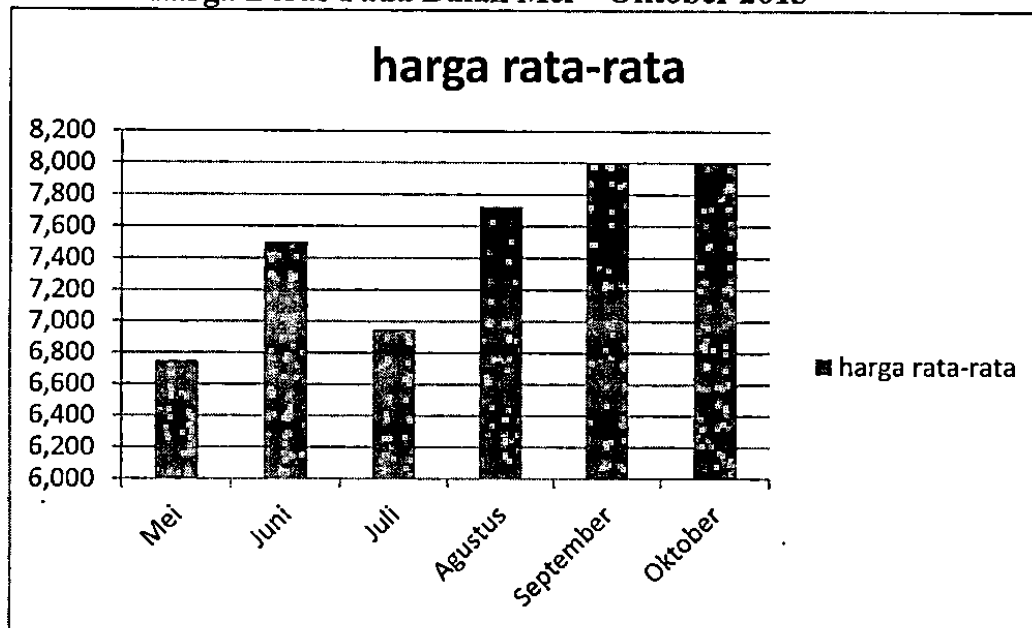
Operasi pasar merupakan salah satu program kegiatan yang memang tidak dilakukan secara berkala. Operasi merupakan salah satu kegiatan yang bersifat *urgency* yaitu insidental dimana ketika merasa diperlukan barulah kegiatan ini dijalankan. Sebelum dilakukannya operasi pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul melakukan beberapa kegiatan seperti misalnya pemantauan secara berkala, kemudian jika terjadi permasalahan maka diidentifikasi terlebih dahulu. Jika memang terjadi kenaikan harga maka pemerintah melakukan beberapa hal. Jika kenaikan harga terjadi karena jumlah stok berkurang maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mendatangkan dari kabupaten lain. Kemudian jika permasalahannya karena pedagang nakal maka Dinas Perindustrian melakukan pengawasan distribusi agar stok merata hingga inspeksi mendadak (Sidak)

“Sejauh ini kami terus melakukan pemantauan secara periodik terhadap harga kebutuhan pokok di pasar. Ketika terjadi lonjakan harga baru kami melakukan sidak untuk menganalisis kenapa terjadi lonjakan harga. Jika lonjakan harga tidak terkendali barulah kami melakukan operasi pasar. Kami juga sudah memiliki kelompok kerja (pokja) yang bertugas melakukan operasi pasar dan memantau harga kebutuhan pokok sehingga ketika terjadi lonjakan harga cepat untuk ditindaklanjuti”¹⁷

Dari hasil penelitian dilapangan didapatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul atau Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memiliki beberapa program terkait dengan operasi pasar murah yaitu mengadakan operasi pasar murah beberapa kelompok komoditas barang kebutuhan pokok dan operasi pasar khusus yang dimasukkan kedalam satuan kerja perangkat daerah di Program perlindungan konsumen. Pada tahun 2013 sendiri operasi pasar yang digelar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul baru sekali yaitu operasi pasar khusus beras. Operasi pasar khusus beras yang diadakan pada minggu kedua Bulan September 2013.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa harga beras memang terus mengalami kenaikan sejak terjadinya kenaikan BBM dan pasca Lebaran. Dimana mulai bulan Agustus harga Beras IR I terus merangkak naik.

Grafik 3.1
Harga Beras Pada Bulan Mei – Oktober 2013



Sumber : Disperindagkop Kab. Bantul

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa meskipun Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan operasi pasar khusus beras, harga beras masih cukup tinggi yaitu 8000 rupiah/kg. Bila dibandingkan dengan bulan Mei Juni dan Juli harga beras masih berkisar 7000 rupiah/kg. Dengan demikian dapat dilihat bahwa operasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah atau Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul belum mampu menurunkan harga kebutuhan pokok di Pasaran. Pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengaku hal ini karena kenaikan harga beras nasional akibat dari naiknya harga BBM.

Sedangkan ketika menjelang memasuki bulan Ramadhan yaitu pada Bulan Juli, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul merasa tidak perlu melakukan operasi karena kenaikan harga yang terjadi di beberapa pasar tradisional Bantul masih dikatakan wajar karena tidak

adanya kenaikan harga yang signifikan. Misalnya pada Bulan Juli harga kebutuhan pokok seperti beras masih berkisar 7000 rupiah dimana dua bulan sebelumnya yaitu bulan mei dan juni masih sama. Untuk daging juga tidak terjadi kelangkaan sedangkan sayuran sendiri justru harganya turun.

*"untuk bulan ramadhan tahun ini operasi pasar memang tidak dilakukan karena kenaikan harga di pasaran masih wajar. kami akan pantau terus harga kebutuhan pokok, kalau memang terjadi lonjakan harga yang signifikan kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait apakah operasi pasar perlu dilakukan atau tidak"*¹⁸

Seperti yang dijelaskan sebelumnya operasi pasar sendiri biasanya diadakan ketika terjadi lonjakan harga. Namun yang perlu dilihat adalah alasan kenapa terjadinya lonjakan harga. Jika lonjakan harga terjadi karena kelangkaan atau kurangnya stok daerah maka operasi pasar bisa berfungsi untuk menurunkan atau menstabilkan harga di pasaran. Namun jika lonjakan harga terjadi karena kenaikan harga Nasional atau Internasional maka operasi pasar tidak memiliki manfaat yang signifikan. Operasi pasar hanya mampu membantu memberikan kemudahan membeli kebutuhan pokok dengan harga murah dalam sementara waktu saja.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Subaryoto, Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul dan dimuat di

2. Sosialisasi dan Pembinaan di Bidang Perdagangan

Sosialisasi dalam hal ini merupakan pengenalan atau memberikan pengertian kepada pihak yang terkait dengan kestabilan harga kebutuhan pokok. Sosialisasi dibidang perdagangan sendiri sangat diperlukan untuk menunjang profesionalisme para pedagang. Hal ini karena saat ini masih seringkali ditemukan para pedagang yang sering kali melakukan permainan harga tanpa memperhatikan nasib para konsumen. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sendiri mengaku kenaikan harga barang di pasaran sering diakibatkan oleh para pedagang yang melakukan kecurangan. Mulai dari penimbunan barang dimana biasanya para pedagang melakukan penimbunan demi mendapatkan keuntungan. Para pedagang sering melakukan penimbunan menjelang kebijakan kenaikan harga barang. Misalnya ketika kebijakan kenaikan harga BBM para pedagang melakukan penimbunan.

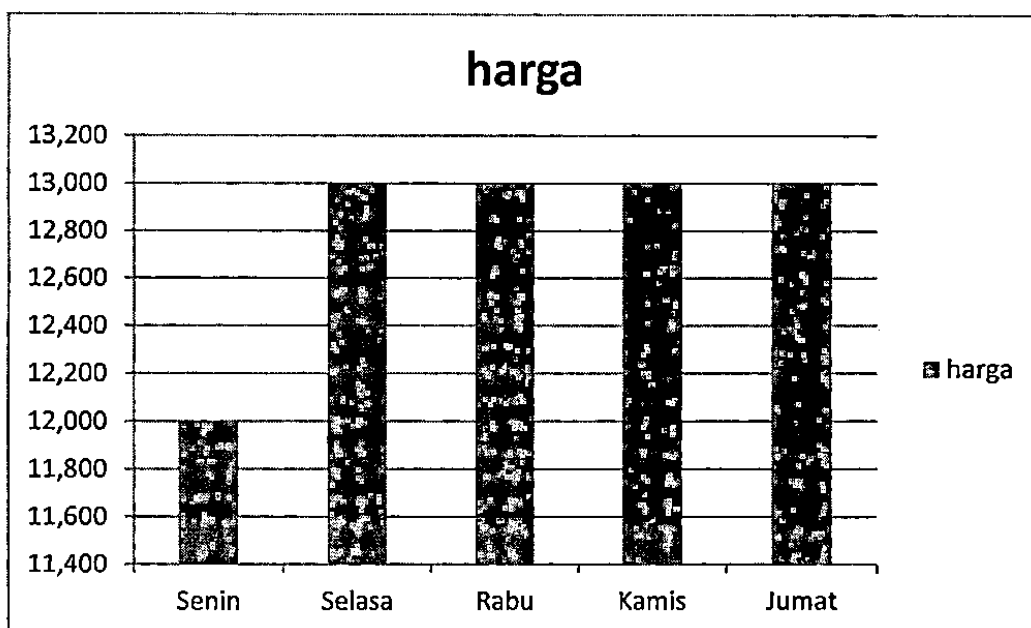
“Sampai saat ini yang masih sering kami temukan adalah adanya beberapa pedagang nakal yang sering melakukan kecurangan, ada yang menimbun barang sampai seringnya pedagang menaikkan harga barang sebelum kebijakan kenaikan nasional diberlakukan. Sampai sekarang kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan apalagi sebentar lagi natal dan tahun baru”¹⁹

Salah satu contoh kasus yang ditemukan dilapangan adalah pada minggu pertama bulan Mei harga minyak goreng sempat mengalami kenaikan drastis yaitu dari 12.000 rupiah menjadi 13.000 rupiah. Tentunya pemerintah tidak bisa tinggal diam sehingga pemerintah daerah khususnya

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Muji Rahayu, Bagian Kesekretariatan, Dinas Perindustrian

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menegur para pedagang yang berlaku curang. Biasanya inspeksi mendadak juga dilakukan untuk mensosialisasikan tata niaga secara langsung kepada para pedagang di pasar. Dari data yang didapat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dilakukan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi pada bulan Mei 2013 karena melonjaknya harga minyak goreng di pasar.

Grafik 3.2
Daftar harga minyak goreng bermerek di minggu I bulan Mei

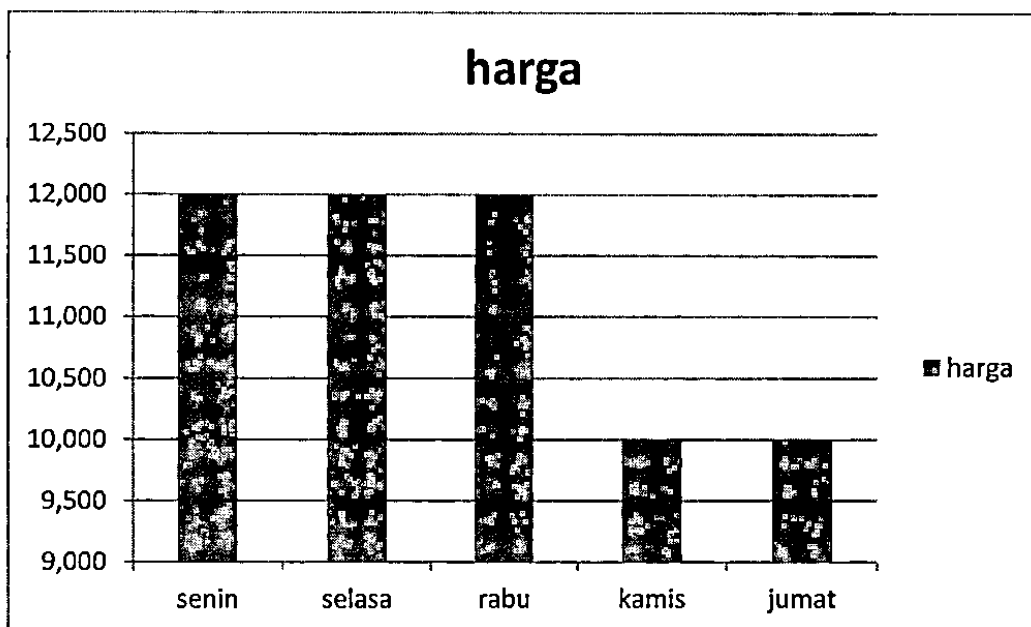


Sumber : Disperindagkop Kab Bantul 2013.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kecurangan para pedagang mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng yaitu dari 12.000 rupiah/liter menjadi 13.000 rupiah/liter. Namun setelah dilakukannya sosialisasi dengan inspeksi mendadak harga minyak goreng kembali

berangsur normal pada minggu kedua. Inspeksi mendadak merupakan salah satu cara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menegur sekaligus menanamkan kesadaran para pedagang akan pentingnya kejujuran atau profesionalisme dalam berniaga atau berjualan. Karena dengan bersikap profesionalisme tentunya kepercayaan (trust) dari para pembeli dapat diraih sehingga dapat membentuk pelanggan yang menguntungkan pedagang sendiri.

Grafik 3.3
Harga Minyak Goreng Bermerek Pada Minggu ke II bulan Mei



Sumber : Disperindagkop Kab Bantul 2013

Dapat dilihat bahwa pada minggu kedua harga Minyak goreng kembali stabil ke angka 12.000 rupiah/liter bahkan sempat mengalami penurunan harga hingga 10.000 rupiah/liternya meskipun isu kenaikan
BPM masih beredar. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul cukup membantu untuk mencegah kecurangan dari para pedagang.

Selain sosialisasi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul juga melakukan pembinaan. Namun dalam program kerja yang didapatkan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi lebih mengutamakan pembinaan di Industri Kecil dan Menengah. Hal ini terkait dengan akan dilangsungkannya Asean Economic Community pada Januari tahun 2015. Kabupaten Bantul memang memiliki industri andalan dibidang kerajinan dan untuk mendukung itu pembinaan lebih diutamakan di bidang industri untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sendiri, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri Kabupaten Bantul memiliki program pembinaan tata niaga bagi para pedagang dan petani. Untuk para pedagang sendiri pada tahun 2013 lebih difokuskan pada pendataan para pedagang kebutuhan pokok. Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi barang dan jasa. Selain itu juga untuk memudahkan pengukuran harga kebutuhan pokok yang lebih akurat. Dengan adanya pendataan tentunya akan memudahkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam memantau pelaksanaan tata niaga di Kabupaten Bantul.

Pendataan ini sangat diperlukan karena ketika terjadi beberapa permasalahan seperti tidak meratanya stok pangan kelangkaan hingga

penimbunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sering menemukan kesulitan untuk mendata jumlah stok barang karena masih banyak pedagang yang tidak terdata. Sulitnya menemukan lokasi pedagang juga menjadi permasalahan ketika hendak melakukan pembinaan sehingga dengan memastikan jumlah pedagang maka sistem database perdagangan yang juga menjadi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat terwujud.

Dari data yang didapatkan dilapangan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menemukan beberapa permasalahan ketika hendak melakukan penyusunan database pedagang. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengaku masih banyak pedagang yang belum mendaftarkan diri secara resmi untuk memenuhi prosedur hukum tata niaga yang ada di Kabupaten Bantul. Contohnya adalah pedagang yang memiliki izin resmi dan berbadan hukum pada tahun 2012 masih minim. Hal ini karena kurangnya kesadaran hukum para pedagang

Tabel 3.3

Jumlah Pedagang yang Berbadan Hukum

No	Kecamatan	Pedagang
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	3
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	5
6	Pandak	7
7	Bantul	25
8	Jetis	11
9	Imogiri	4
10	Dlingo	2
11	Pleret	10
12	Piyungan	16
13	Banguntapan	87
14	Sewon	77
15	Kasih	68
16	Pajangan	2
17	Sedayu	7
	Jumlah	225

Sumber : BPS Provinsi DIY 2012

Seperti yang dijelaskan dalam tabel diatas bahwa jumlah pedagang yang mengantongi izin resmi masih sedikit. Seperti yang diketahui jumlah pedagang di kabupaten bantul pada tahun 2012 lebih dari 400 orang pedagang. Jadi jika dilihat dari tabel tersebut jumlah pedagang yang terdaftar baru 50 persen. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul dalam mengelola perdagangan. Seperti dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dimana biasanya Dinas Perindustrian

Setelah pendataan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

memprogramkan pembinaan sebanyak dua kali pertemuan pada tahun

2014 yaitu pembinaan tentang hukum tata niaga dan membina perdagangan terkait perlindungan konsumen. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan melindungi konsumen. Karena mengingat kepercayaan dari masyarakat akan pelayanan pemerintah sangat diperlukan disamping mengembangkan potensi adanya pasar tradisional. Karena saat ini masih banyak masyarakat memilih berbelanja di supermarket di bandingkan pasar tradisional.

3. Pemantauan distribusi barang dan jasa

Pemantauan merupakan salah satu program kegiatan rutin dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Pemantauan biasanya diperlukan untuk mengetahui berbagai keadaan yang terjadi dilapangan. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pemantauan sangat membantu bagi sebuah instansi karena dengan adanya pemantauan akan mudah menemukan acuan ataupun alasan pentingnya melakukan sebuah kebijakan ataupun kegiatan tertentu.

Dalam hal ini pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdiri dari beberapa macam yaitu :

a. Pemantauan proses pendistribusian barang

Pemantauan proses pendistribusian ini biasanya dilakukan dengan memantau kegiatan distribusi barang dan jasa dilapangan. Distribusi mulai dari para petani kemudian ke tangan pedagang hingga ke tangan konsumen atau masyarakat

Hal ini karena pendistribusian sangat penting dan dapat mempengaruhi harga barang di pasaran. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tentu perlu melakukan pemantauan untuk menjamin Pendistribusian yang merata agar setiap masyarakat dapat menjangkau barang atau komoditas tersebut. Proses distribusi barang dan jasa juga sering menjadi peluang atau potensi kecurangan dari beberapa pedagang yang sering merugikan para petani dan pembeli. Pendistribusian sering memiliki potensi untuk dilakukannya penimbunan oleh para pedagang hingga sering kali terjadi kenaikan harga yang tidak masuk akal.

b. Pemantauan proses perdagangan di pasar

Pemantauan seperti ini biasanya dilakukan untuk mengetahui harga barang atau komoditas pangan di pasaran. Dengan adanya pemantauan proses perdagangan secara langsung pemerintah dapat mengetahui keluhan dari para konsumen secara langsung. Pemantauan proses perdagangan biasanya dilakukan dengan menerjunkan beberapa orang ke pasar untuk memantau harga barang dan keluhan para konsumen akan harga kebutuhan pokok

Dari hasil yang ditemukan dilapangan, Dinas perindustrian melakukan pemantauan sekali setiap minggunya. Di Sub Bagian

Perdagangan dimana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah

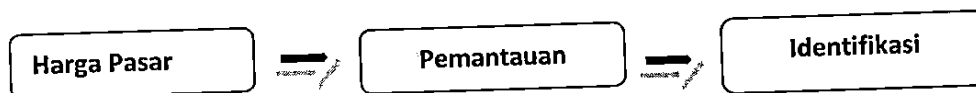
memiliki kelompok kerja (pokja) yang bertugas sebagai tim pemantau harga kebutuhan pokok di pasaran. Adapun yang menjadi lokasi tetap pemantauan harga kebutuhan pokok adalah Pasar Niten, Pasar Bantul dan Piyungan. Sedangkan yang menjadi lokasi tidak tetap pemantauan adalah Pasar Imogiri, Pundong beberapa pasar di kecamatan lainnya.

“Dibagian perdagangan kami sudah memiliki pokja yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin dan biasanya pemantauan dilakukan sekali seminggu. Pemantauan biasanya dilakukan di beberapa pasar besar seperti Pasar Niten, Pasar Bantul, Piyungan dan beberapa pasar lainnya. jika terjadi lonjakan harga kami tidak langsung melakukan operasi pasar tetapi dicari tau alasannya kenapa lonjakan harga terjadi. Kalau memang terjadi kelangkaan kami mendatangkan stok dari pasar yang memiliki stok lebih”²⁰

Pemantauan sendiri dalam hal kestabilan harga kebutuhan pokok tidak memberikan dampak secara langsung karena pemantauan merupakan salah satu langkah dimana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul hanya melihat perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dengan adanya pemantauan maka akan lebih mudah dilakukan identifikasi masalah ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Gambar 3.1

Alur Proses Pemantauan Harga Pasar

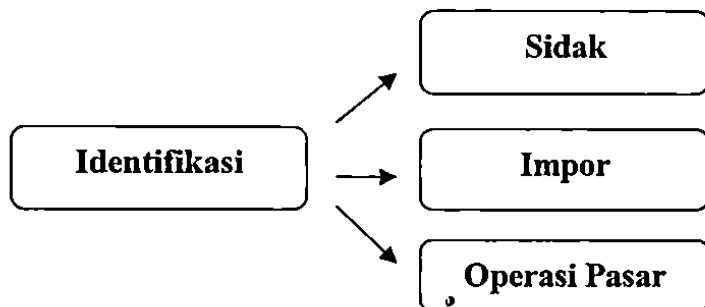


²⁰ Wawancara dengan Ibu Muji Rahayu, Bagian Kesekretariatan , Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul 2013

Dengan adanya pemantauan secara rutin pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu hingga akhirnya dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Jadi informasi yang didapat dengan adanya pemantauan disini menjadi acuan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mengambil tindakan selanjutnya.

Gambar 3.2

Tindak Lanjut Dari Pemantauan Harga



Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan identifikasi ketika kenaikan harga barang, Dinas Perindustrian Perdagangan tidak langsung melakukan operasi pasar. Namun semuanya tergantung dari masalah yang ditemukan. Jika terjadi kenaikan harga karena kecurangan dari pedagang maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi melakukan inspeksi mendadak (sidak). Kemudian jika terjadi kenaikan harga barang karena kurangnya stok barang di pasar lokal maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan impor dari kabupaten lain. Sedangkan operasi pasar merupakan tindakan akhir dari kenaikan

harga barang. Jika kedua tindakan sebelumnya tidak berhasil maka barulah operasi pasar dijalankan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa disini merupakan pembelian sejumlah barang atau komoditas tertentu dari kabupaten lain untuk mengatasi masalah kestabilan harga. Ada beberapa alasan kenapa pengadaan barang dan jasa atau impor ini diperlukan. Pertama adalah karena terjadinya kelangkaan jumlah komoditas lokal. Kelangkaan stok atau jumlah barang yang tersedia di Kabupaten Bantul tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak jarang kelangkaan terjadi yaitu dimana jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat lebih sedikit dari permintaan yang datang dari masyarakat sendiri. Sehingga kelangkaan dapat mengancam terjadinya kenaikan harga barang. Ini berarti kelangkaan juga mempengaruhi kestabilan harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa biasanya diperlukan apabila kelangkaan yang terjadi mengancam kestabilan harga kebutuhan pokok. Dari hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mendatangkan sayuran dari Kabupaten Kulon Progo ketika terjadinya kelangkaan sayuran. Kelangkaan ini terjadi pada bulan Januari 2013 dimana Bantul dilanda cuaca buruk selama beberapa pekan hingga kurangnya stok sayuran lokal hal ini tentunya memicu harga kebutuhan pokok sayuran yang merangkak

naik. Contohnya adalah beberapa sayuran yang mengalami kenaikan harga seperti Cabe, Buncis, Tomat dan Kol.

Tabel 3.4

Fluktuasi Harga Sayuran Akibat Cuaca Buruk

No	Sayuran	Desember 2012	Januari 2013	Februari 2013
1	Cabe Rawit Merah	10.000	28.000	28.000
2	Buncis	5000	5.500	6.000
3	Bawang Merah	13.000	18.000	20.000
4	Bawang Putih	20.000	32.000	34.000

Sumber : Disperindagkop Kab. Bantul 2013

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa akibat cuaca buruk pada bulan Januari 2013 beberapa komoditas sayuran dan bumbu mengalami kenaikan yang tajam. Meskipun pemerintah daerah Bantul khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah mendatangkan sayuran dari Kulon Progo, harga sayuran tetap mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa kegiatan impor ini belum mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok. Menurut Ibu Muji pihak kesekretariatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul mengakui bahwa cuaca buruk tahun ini sangat mengganggu kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bantul. Hal ini karena terganggunya perkebunan dan pertanian Bantul akibat cuaca buruk dimana hasil panen sayuran menjadi menurun.

Namun dalam beberapa bulan kedepan harga kebutuhan diprediksi akan

menurun seiring dengan musim hujan semakin dekat dan musim panas akan segera berakhir.

5. Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang

Pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang merupakan salah satu langkah yang digunakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam mengatasi ketidakstabilan harga komoditas pangan seperti jagung, beras, kedelai dan yang lainnya. awal munculnya sistem resi gudang adalah karena ketika menjelang panen para petani menjual hasil panen dengan harga yang murah karena stok pangan yang melimpah. Namun ketika musim kemarau tiba para petani tidak punya stok pangan sehingga stok pangan di pasaran menipis sehingga beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Sehingga untuk mengatasi masalah ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul melakukan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang No 9 Tahun 2006 yaitu pasal 1 ayat 1 bahwa sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan , penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan

Adapun manfaat dengan adanya Sistem Resi Gudang adalah :

- a. Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun (all year long)
- b. Keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.
- c. Keleluasaan penyaluran kredit perbankan dengan terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan.
- d. Keterjaminan produktivitas. Jaminan komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/ petani.
- e. Keterkendalian sediaan (*stock*) nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang.
- f. Keterpantauan lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan

konsumen, pengendalian ekosistem (*nuisance species*), pengendalian lalu lintas produk komoditi ilegal, dsb.

- g. Keterjaminan bahan baku Industri. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan negara tersebut. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.
- h. Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya penindakan

- i. Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.²¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Kabupaten Bantul sendiri telah membangun gudang pada tahun 2007 di Niten yang kini digunakan sebagai pengelolaan sistem resi gudang. Dalam hal ini Dinas Perindustrian merasa akan lebih mudah mengendalikan harga kebutuhan pokok khususnya pangan dengan adanya sistem resi gudang. Seperti yang dijelaskan dengan adanya sistem resi gudang maka pusat pengelolaan stok pangan kini menjadi lebih terfokus pada satu tempat yaitu di gudang yang telah ditentukan sehingga tidak perlu melakukan survei ke setiap petani yang tersebar di Kabupaten Bantul.

Sejak adanya sistem resi gudang, Kabupaten Bantul mengalami over-abundance beras 20.000–25.000 ton tiap tahun. Sistem resi gudang sendiri mampu menampung hingga 150.000 ton beras setiap tahunnya. Sejak tahun 2007 jumlah ketersediaan pangan khususnya padi di Kabupaten Bantul meningkat sehingga peran sistem resi gudang sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan sangat diperlukan.

“Sistem resi gudang sendiri sudah diberlakukan sejak lama tentunya hal ini sangat membantu terutama dalam hal menyimpan hasil panen. Karena sering kali ketika panen raya harga beras atau pangan lainnya anjlok drastis karena persediaan di pasaran sangat banyak. Supaya petani tidak rugi dan harga pangan di pasaran tetap stabil maka kami mengajak para petani untuk menggunakan sistem resi gudang ini. Disini kami menyediakan fasilitas mulai dari pengeringan hingga penggilingan. Petani juga

²¹ Manfaat Resi Gudang. <http://buk.kemendagri.go.id/11/manfaatRG.asp>. Dinas Pisi. FUUH 2010.

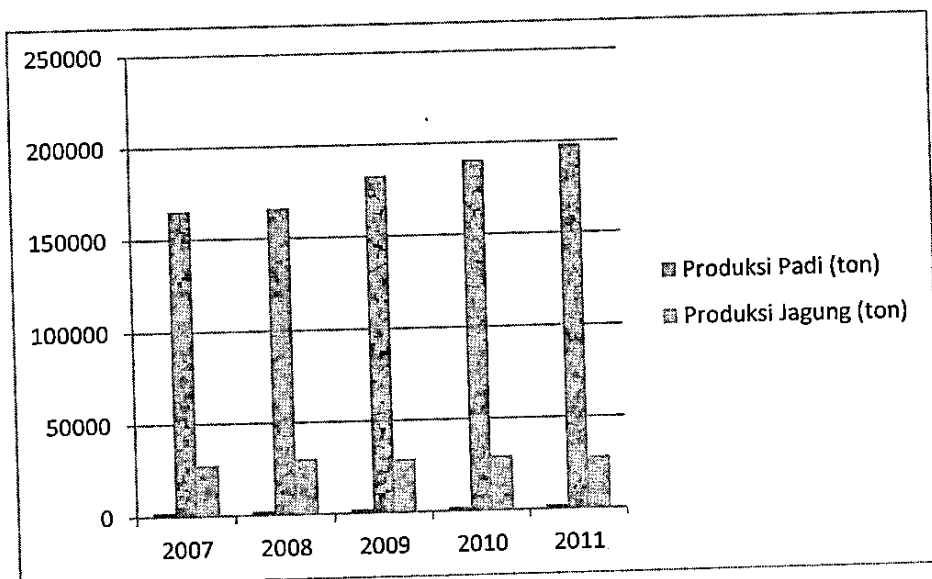
bisa mendapatkan kredit atau melakukan simpan pinjam dengan adanya kerjasama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Namun sampai sejauh ini masih banyak petani yang belum mengetahui sistem resi gudang sehingga kami masih terus melakukan sosialisasi dan penyusunan database”²²

Tabel 3.5
Jumlah Produksi Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011

No	Tahun	Produksi Padi (ton)	Produksi Jagung (ton)
1	2007	165.300	27.345
2	2008	166.273	30.177
3	2009	182.843	28.775
4	2010	190.356	29.539
5	2011	198.001	28.081

Sumber : BPS Kabupaten Bantul 2012

Gambar 3.3
Jumlah Produksi Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011



²² Wawancara dengan Ibu Muji Rahayu, Bagian Kesekretariatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul 2013

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan produksi komoditas pangan di Kabupaten Bantul terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu biasanya pasca panen harga beras dan beberapa komoditas pangan lainnya sering anjlok karena stok di pasaran banyak. Oleh karena itu sistem gudang ini disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk menyimpan sebagian hasil panen agar harga pangan tetap stabil. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum maksimalnya minat dari para petani untuk mengikuti kegiatan Sistem Resi Gudang. Hal ini dibuktikan bahwa sampai sekarang jumlah beras yang disimpan di Gudang Niten Hanya 100.000 ton saja. Padahal jumlah panen setiap tahunnya mampu mencapai 150.000 hingga 160.000 ton.

Untuk menstabilkan harga, sistem resi gudang memberikan kemudahan bagi para petani dalam hal biaya produksi. Dimana dengan mengikuti pengelolaan sistem resi gudang biaya penyimpanan produksi petani menjadi lebih murah. Berdasarkan data BPS (2008), harga rata-rata gabah di tingkat petani pada Juni 2008 sebesar Rp 2447/kg gkp (lebih tinggi 10,1 persen di atas Harga Pembelian Pemerintah/HPP yaitu Rp 2.200/kg), sedangkan pada musim panen raya Maret 2010 lebih rendah 32 persen dari HPP. Jadi pada Juni-Agustus yaitu pada masa paceklik harga padi cenderung lebih tinggi dari HPP (sampai 8,4-10,1 persen), sedangkan pada masa panen raya yaitu pada Februari-April harga cenderung di bawah

harga HPP. Fluktuasi harga ini akan merugikan petani sehingga tunda jual sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik.²³

Selain itu, di Bantul sendiri pengelolaan sistem resi gudang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan kemudahan untuk melakukan simpan pinjam. Sistem resi gudang sendiri juga memberikan beberapa fasilitas mulai dari pengeringan gabah, penggilingan dan penyimpanan. Hal ini lebih meringankan para petani sehingga mudah mengontrol biaya produksi untuk musim selanjutnya.

Tabel 3.6

Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

No	Tahun	Kabupaten Bantul		Kota Yogyakarta	
		Indeks Harga Konsumen (IHK)	Inflasi	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Inflasi
1	2006	138,87	7,61	150,97	10,40
2	2007	148,72	7,10	163,04	7,94
3	2008	163,98	10,26	113,32	9,88
4	2009	120,64	2,99	116,64	2,93
5	2010	128,55	6,56	125,25	7,38
6	2011	133,35	3,73	130,11	3,88

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

²³Bantul dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2008

Jika diketahui bahwa pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang diadakan sejak 2007 dan mulai digunakan pada tahun 2008 maka dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sejak tahun 2009 hingga 2011 indeks harga konsumen cenderung turun dari tahun ke tahun yang artinya pengeluaran konsumen terhadap beberapa komoditas mulai menurun. Selain itu berdasarkan data dilapangan didapatkan bahwa sektor pangan hasil pertanian merupakan sektor yang memiliki sumbangan terbesar terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) yaitu rata rata 22% setiap tahunnya.²⁴

A. Dampak Terhadap Kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memiliki berbagai peranan dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok. Namun melihat keluhan masyarakat yang masih merasa peranan pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan.

“biasanya dulu saya mendapatkan kupon operasi pasar murah namun saat ini yang mendapatkan tiket harus digilir dan sudah sejak lama saya tidak bisa mengikuti pasar murah karena tidak mendapatkan kupon. Meskipun pemerintah memberikan operasi pasar murah namun tetap saja harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. bahkan sekarang harga kebutuhan pokok masih tinggi.”²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa sampai sejauh ini upaya dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam menstabilkan harga

²⁴ RKPD Kabupaten Bantul 2013

²⁵ Wawancara dengan Ibu Mukirah, pembeli di Pasar Bantul tanggal 17 Desember 2013

kebutuhan pokok masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Peranan yang diberikan saat ini hanya mampu membantu masyarakat dalam waktu sementara saja bukan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu pelaksanaan dari operasi pasar sendiri masih belum merata karena tidak semua masyarakat kurang mampu merasakan manfaatnya.

Peranan pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok juga tentunya dipengaruhi oleh adanya kemauan pemerintah atau *political will* untuk memberikan perhatian lebih kepada kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Meskipun seperti yang kita ketahui pemerintah Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dari hasil yang ditemukan saat ini *political will* pemerintah masih sangat rendah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok. Di Bantul sendiri *political will* Pemerintah Daerah terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok masih rendah dimana hal ini dibuktikan dengan program pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan melindungi masyarakat tidak mengalami perubahan sejak dulu.

“Dalam banyak kasus, operasi pasar tidak begitu efektif. Selain sifatnya yang temporer, operasi pasar juga hanya menjangkau segmen kecil dari masyarakat. Akibatnya, operasi pasar terkadang tidak begitu efektif menahan laju kenaikan harga dan memastikan ketersediaan sembako yang bisa dijangkau rakyat. Menurut kami, pemerintah harus turun tangan untuk mengurangi beban penderitaan rakyat. Pertama, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol harga sembako. Langkah ini penting untuk melawan aksi spekulasi dan penimbunan. Kedua, pemerintah bisa menciptakan toko-toko atau pasar

yang sifatnya temporer dan jangkauannya terbatas, toko-toko sembako ini di tiap-tiap teritori dengan prioritas warga miskin. Hanya saja, sebelum membangun toko sembako murah ini, pemerintah harus punya stok atau tempat penyimpanan sembako yang memadai. Toko-toko sembako ini menggandeng Bulog dan BUMN di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.”²⁶

Jika melihat program pemerintah saat ini masih maka peranan yang diberikan pemerintah masih hanya memberikan dampak sementara saja. Kebutuhan pokok sendiri harus dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang lama sehingga untuk mensejahterakan masyarakat pemerintah harus mengambil langkah yang signifikan.

“Saat ini, akibat liberalisme ekonomi, harga sembako makin ruwet. Pertama, harga sembako, yang notabene kebutuhan pokok rakyat, sudah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, harga sembako tidak disesuaikan dengan tingkat kemampuan membeli rakyat, melainkan pada keputusan pasar. Kedua, sebagian besar barang kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, diperoleh atau didatangkan melalui impor. Harga barang-barang ini sangat ditentukan oleh gejolak pasar global. Di sinilah masalahnya: harga barang itu terkadang tidak sesuai dengan realitas ekonomi atau daya beli rakyat Indonesia. Belajar dari hal-hal di atas, pemerintah seharusnya punya politik untuk mengontrol harga. Hal ini, tentu saja, di mata penganut neoliberal, dianggap dosa atau kejahatan. Akan tetapi, dalam aras kepentingan nasional, hal itu sangat patut diambil oleh pemerintahan-pemerintahan yang mengabdikan kepada rakyat.”²⁷

Dengan peranan saat ini yang tidak mampu menyelesaikan masalah kebutuhan pokok masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah yang berfungsi secara signifikan. Namun dengan *political will* yang masih rendah terhadap kebutuhan pokok maka peranan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sehingga dengan demikian peranan yang diberikan saat ini masih belum efektif menyelesaikan masalah kestabilan harga kebutuhan pokok .

²⁶Diakses di www.berdikarionline.com pada 16 desember 2013 pukul 19.57 WIB

²⁷Diakses di www.berdikarionline.com pada tanggal 16 Desember 2013 pukul 20.05 WIB